

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Z. (2021). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.

Ali, Z. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Arianto, G. N., Paulina, A. L., Azzahro, S. S., Maharani, M., Budiarti, A. I., Latuputty, M. H., Sutanti, K., Risha, F., Sabrina, G., Azzahra, A., Maulana, A., & Wicaksono, R. A. (2024). *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS).

Collins, J. S., Trisia, S., & Oktaviani, N. (2021). *Kebijakan Bantuan Hukum di Indonesia dalam Kerangka Demokrasi Analisis berdasarkan Konsep Pemenuhan Hak dan Partisipasi Masyarakat*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI).

Mukianto, J. (2017). *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*. Kencana.

Pramono, B. (2020). *Sosiologi Hukum*. Scopindo Media Pustaka.

Ruhama, T. D., Matakena, M. A., Latuputty, M. H., Prasetyawati, P., Amir, M., Simanjuntak, N. A., Saraswati, A., Azharrahman, A., Sanrose, D. F., Sirait, R. H., Wibowo, S. D., Kusumawardhani, S., Budiarti, A. I., Warner, M. R., Wicaksana, D. A., Arianto, G. N., Puteri, B. P. T., Ramadhan, C. R., Nurtjahyo, L. I., ... Permana, R. B. (2021). *Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia Tahun 2021*. UI Publishing.

Sudijono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pembelajaran*. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (5th ed.). Alfabeta.

Uno, Hamzah. B., & Koni, S. (2013). *Assessment Pembelajaran*. Bumi Aksara.

Wicaksana, D., Natosmal Oemar, E., Herwati, S. R. M., Ramadhan, C. R., Oktaviani, N., Budiarti, A. I., Trisia, S., Warneri, M. R., Lesmana, M. I., Prawira, M. R. Y., Syahni, Y., Sari, E. P., Tobing, T. A., Attar, N., Tedjaseputra, J. A., & Primaldhi, A. (2022). *Konsorsium Masyarakat Sipil Untuk Indeks Akses Terhadap Keadilan, Indeks Akses Terhadap Keadilan Di Indonesia 2019* (2nd ed.). Indonesia Judicial Research Society (IJRS).

Winarta, F. W. (2009). *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Yunita, M. (2017). *Bantuan Hukum Studi Puskobakum Fakultas Syari'ah*. Penerbit: Imam Bonjol Press.

Artikel Jurnal

Abib, A. S., Heryanti, B. R., & Nuswanto, A. H. (2023). Penguatan Pemahaman Masyarakat Trimulyo Genuk Semarang Mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 141. <https://doi.org/10.26623/kdrkm.v4i2.8184>.

Aisy, L. R., Rusdiyana, E., Sudibya, S., Prasetyani, D. D., Permatasari, D. P., Saputra, A. A., Alfauzi, M. E., Zuhri, M. S., & Shofy, M. N. (2024). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum*. 4(1), 27–38. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v3i4.2796>.

Ananda, S. Z., Anwar, U., & Priyatmono, B. (2021). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tahanan Kurang Mampu di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat. *Journal of Correctional Issues*, 4(2), 146–160. <https://doi.org/10.52472/jci.v4i2.71>.

Asikin, D. F., Riyanto, A., & Asril, T. (2025). Implementasi Teknis Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Depok. *Jurnal Hukum Dan Peradilan: Similia Similibus*, 2(2), 114–129.

- Aswandi, A., Soa, A. H., Azizurrahman, Sy. H., Ismawati, S., Hermansyah, Siagian, P., Herlina, Hertini, M. F., & Abunawas. (2023). Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Singkawang. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 170–176. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i3.191>.
- Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nur'aini, S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 837–845.
- Gunawan, F., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Soegianto, S. (2024). Peran Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (The Role of Legal Aid for Suspects in the Investigation Process). *Jurnal USM Law Review*, 7(3). <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.11056>.
- Hadji, K., Sulistiowati, Arianti, A. S., Khoirunisa, A., Kusmawati, N. A., & Putri, M. H. (2024). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 112–117. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.271>.
- Hardianto, H., Musa, L. A. D., & Lewa, I. (2022). Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 374–384. <https://doi.org/10.35914/tomaega.v5i3.1118>.
- Hasan, Z., & Renaldy, D. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 17(1), 95--102. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v17i1.1041>.
- Lestari, R. M., & Wijaya, R. (2021). Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Surat Ijin Mengemudi (Sim) C Di Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 9(3), 565–579.

Marlina, A., Rasna, R., Rahman, A., & Suci, P. (2024). Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Unreachable Justice Access: A Study on Legal Aid for the Poor Community). *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 540–555.

Nazril, S. (2022). Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Lex Lata*, 4(3), 330–340. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.1817>.

Nuristiningsih, D., & Agustina, M. (2024). Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. *Majalah Keadilan*, 24(2), 1–17.

Silitonga, S. P., & Sagala, P. (2025). Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia: Studi Empiris dan Analisis Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(1), 113–127. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i1.4193>.

Wijaya, E., Bachri, R., Wardani, A., & Padayanti, K. (2019). Merespons Kebutuhan Masyarakat Terhadap Hukum Melalui Penyuluhan Kepada Masyarakat Di Kelurahan Jatimulya, Depok. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 299–304. <https://doi.org/10.12928/jp.v3i3.999>.

Laporan Pemerintah

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2020). *Laporan akhir analisis dan evaluasi hukum terkait akses pelayanan bantuan hukum*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. https://bphn.go.id/data/documents/3_buku_pokja_bankum.pdf.

Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2025). *Profil Kemiskinan Kota Depok 2025 Volume 5*. Badan Pusat Statistik Kota Depok.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 14 Seri E.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 15.

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 91 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin. Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 91.